

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) 2021



DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU

Jl. Cut Nyak Dien No.6 Pekanbaru

  @disbunriau

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 atas tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai langkah perbaikan yang berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*).

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat dan dijadikan perbaikan penyempurnaan proses perencanaan dan pelaksanaan dalam memberikan informasi akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau kedepan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Tugas Dan Fungsi	5
1.4 Aspek Strategis Organisasi	7
1.5 Permasalahan Utama	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis OPD	10
2.2 Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.1.1 Membandingkan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu	18
3.1.2 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Target Renstra OPD	24
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional	27
3.1.4 Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan	29
3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
3.1.6 Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	39
3.2 Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan Umum	57
4.2 Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh OPD untuk meningkatkan Kinerja masa mendatang	58
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	
Dokumen pendukung lainnya	

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021	5
Tabel	2	Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021	6
Tabel	3	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021	6
Tabel	4	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	11
Tabel	5	Target Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021	13
Tabel	6	Skala Nilai Peringkat Kinerja	14
Tabel	7	Penilaian Realisasi Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021	15
Tabel	8	Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2019- 2021	18
Tabel	9	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2021	24
Tabel	10	Realisasi Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau dibandingkan dengan Capaian Tingkat Nasional Tahun 2021	27
Tabel	11	Capaian Realisasi Program dan Kegiatan dan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021	33
Tabel	12	Kebijakan Strategi Penyelesaian Masalah Strategis Perkebunan Tahun 2021	40
Tabel	13	Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021	43
Tabel	14	Realisasi Anggaran APBN Dinas Perkebunan Provinsi Riau dana DEKONSENTRASI Tahun 2021	50
Tabel	15	Realisasi Anggaran APBN Dinas Perkebunan Provinsi Riau dana TUGAS PEMBANTUAN Tahun 2021	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi beserta Pemangku Jabatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021	3
Gambar 2	Struktur Organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan beserta Pemangku Jabatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021	4
Gambar 3	Struktur Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan beserta Pemangku Jabatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021	4

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perkembangan Produksi Kelapa Sawit Tahun 2017 s/d 2021	20
Grafik 2	Perkembangan Produksi Kelapa Tahun 2016 s/d 2021	20
Grafik 3	Perkembangan Produksi Karet Tahun 2016 s/d 2021	21
Grafik 4	Perkembangan Produktivitas Kelapa Sawit Tahun 2016 s/d 2021	21
Grafik 5	Perkembangan Produktivitas Kelapa Tahun 2016 s/d 2021	22
Grafik 6	Perkembangan Produktivitas karet Tahun 2016 s/d 2021	23
Grafik 7	Perkembangan Produktivitas Sagu Tahun 2016 s/d 2021	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau serta sebagai bahan pedoman dalam peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan instansi pemerintah selama satu tahun. Laporan kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Terkait dengan hal tersebut, Laporan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2021. Selain itu LKjIP Tahun 2021 juga bertujuan untuk memberikan umpan balik terhadap

upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan pembangunan perkebunan Provinsi Riau.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021.
2. Mendorong Dinas Perkebunan Provinsi Riau didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perkebunan Provinsi Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi

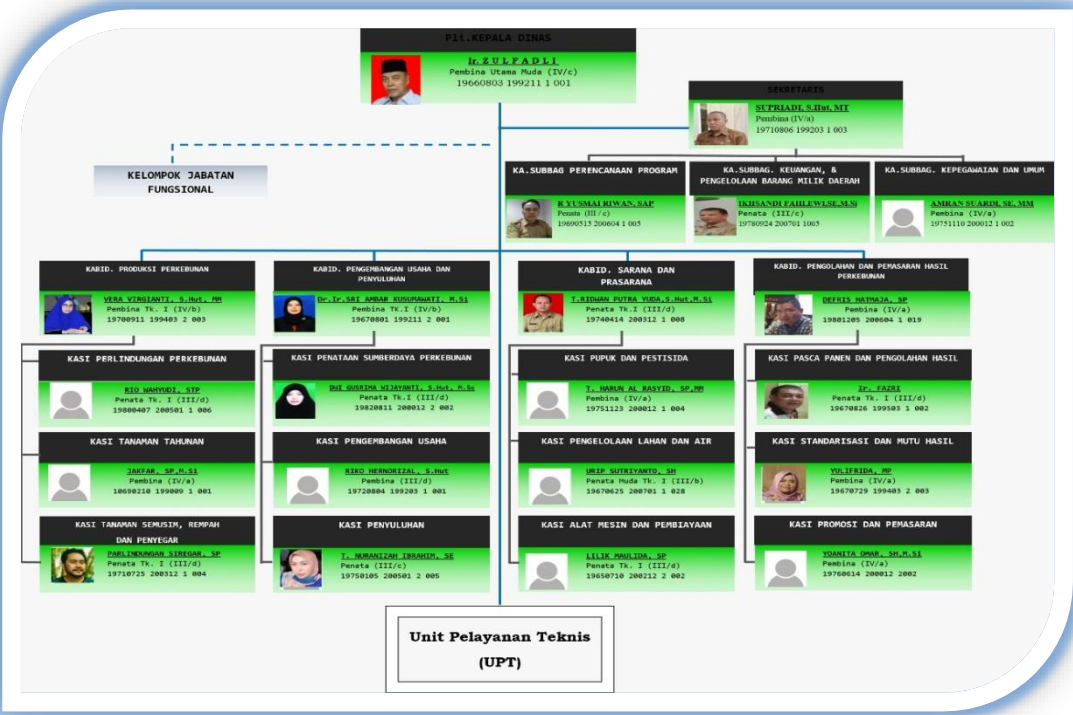
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Adapun Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Riau terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Perencanaan Program
 - 2). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 3). Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. Bidang Produksi, terdiri dari:
 - 1). Seksi Perlindungan Perkebunan
 - 2). Seksi Tanaman Tahunan
 - 3). Seksi Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar

- d. Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, terdiri dari:
 - 1). Seksi Penataan Sumberdaya Perkebunan
 - 2). Seksi Pengembangan Usaha
 - 3). Seksi Penyuluhan
- e. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
 - 1). Seksi Pupuk dan Pestisida
 - 2). Seksi Pengelolaan Lahan Dan Air
 - 3). Seksi Alat Mesin dan Pembiayaan
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, terdiri dari:
 - 1). Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
 - 2). Seksi Standarisasi dan Mutu Hasil
 - 3). Seksi Promosi dan Pemasaran

Adapun gambar struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

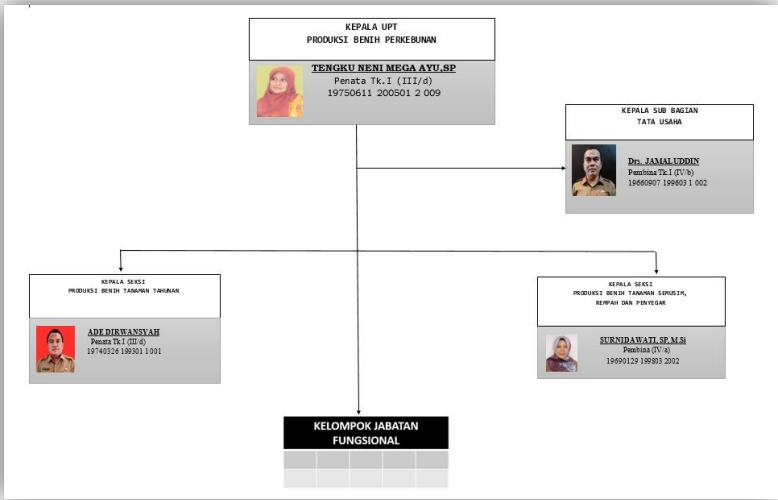
Gambar 1
Struktur Organisasi beserta Pemangku Jabatan
Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021



- g. UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan terdiri atas:
 - 1). Kepala UPT
 - 2). Subbagian Tata Usaha
 - 3). Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan
 - 4). Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
 - 5). Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambar struktur organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

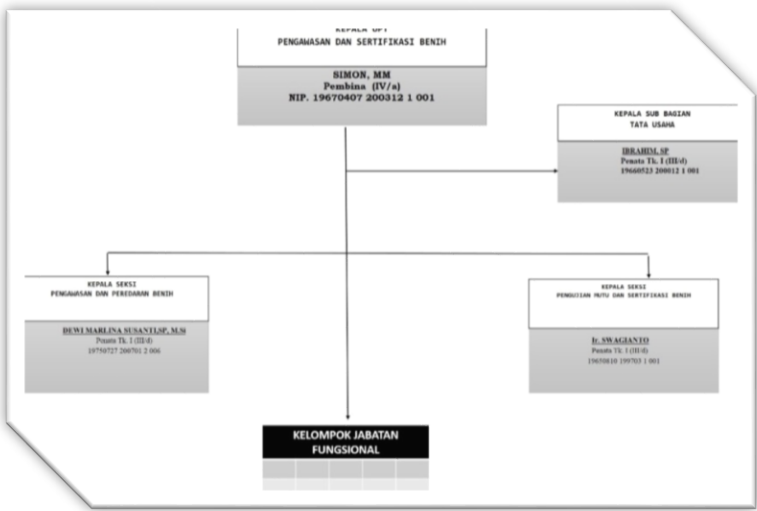
Gambar 2
Struktur Organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan
beserta Pemangku Jabatan
Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021



- h. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, terdiri atas:
- 1). Kepala UPT
 - 2). Subbagian Tata Usaha
 - 3). Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih
 - 4). Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih
 - 5). Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambar struktur organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

Gambar 3
Struktur Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
beserta Pemangku Jabatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021



1.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Perkebunan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perkebunan serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Sebagaimana yang diatur dalam Bab III Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

❖ **Kepegawaian**

a. **Jumlah Pegawai**

Pada awal tahun 2021 jumlah pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah 179 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 103 orang dan honorer sebanyak 76 orang. Jumlah ini berkurang pada akhir Tahun 2021 sebanyak 14 orang yang memasuki masa purna bakti sehingga sampai akhir 2021 jumlah pegawai Dinas Perkebunan sebanyak 165 orang yang terdiri dari 103 ASN dan 76 orang THL. Untuk lebih jelasnya data pegawai lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Tahun 2021.

No	Unit Kerja Dinas	Jumlah Aparatur				Jumlah
		Struktural	Fungsional Umum	Fungsional Tertentu	Honorer	
1	Kepala Dinas/ Sekretariat/ Bidang	21	62	5	60	148
2	UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan	4	3	-	11	18
3	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	4	-	4	5	13
	JUMLAH	29	65	9	76	179

Ket : Kondisi Desember 2021

b. Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2 .
Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai	Honoror	Jumlah	Persentase
1	Strata 3	-	-	-	-
2	Strata 2	29	2	31	17,31
3	Strata 1	57	34	91	50,83
4	Diploma (1-4)	4	4	8	4,46
5	SMA/SMK/MA	13	36	49	27,40
6	SMP/MTs	-	-	-	-
7	SD	-	-	-	-
TOTAL		103	76	179	100

c. Pangkat dan Golongan

Sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	IV.d	1
2	IV.c	1
3	Pembina/IV.b	10
4	Pembina/IV.a	19
5	Penata Tingkat I/III.d	29
6	Penata/III.c	9
7	Penata Muda Tingkat I/III.b	16
8	Penata Muda/III.a	11
9	Pengatur Tingkat I/II.d	1
10	Pengatur/II.c	4
11	Pengatur Muda Tingkat I/II.b	1
12	Pengatur Muda/II.a	1
13	/I.d	0
14	/I.c	0
	Jumlah	103

❖ **Keadaan Sarana Dan Prasarana**

Keadaan sarana dan prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan asset yang dimiliki mulai dari tanah, gedung kantor, sarana transportasi, sarana perkantoran dan lain-lain tersebar di beberapa wilayah kerja. Asset Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 disusun dalam laporan Barang Milik Daerah (BMD) dapat dilihat pada lampiran.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam rangka mewujudkan peran strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah tertuang dalam Renstra, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan perkebunan antara lain sebagai berikut:

1. Karakteristik lahan, kondisi fisik kimia tanah, ketersediaan dan suplai air, aspek topografi, geomorfologi, pola hidrologi maupun aksesibilitas menjadi faktor yang perlu diperhitungkan untuk merancang kawasan.
2. Penanganan budidaya dan produksi serta tata kelola teknologi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Penanganan pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen yang ramah lingkungan jika tidak diterapkan akan berdampak pada menurunnya mutu, rendahnya nilai jual, turunnya nilai kompetitif
4. Layanan pengaturan ekosistem melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam
5. Layanan kultural melalui aplikasi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola SDA
6. Penggunaan lahan sesuai dengan jenis peruntukan lahan, potensi SDA yang tersedia dan SDM yang terlibat
7. Efisiensi dalam pengadaan produk pendukung (pupuk, pestisida, benih), teknologi infrastruktur pendukung (alat/mekanisasi), SDA pendukung (air, media tanah) yang akan diterapkan
8. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan perkebunan akan membentuk ekosistem buatan, terjadinya perubahan ekosistem alami secara terus menerus berdampak pada meningkatnya kerentanan ekosistem, dan kondisi ini mempengaruhi tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim.

9. Pola budidaya monokultur ditinjau dari aspek keseimbangan ekosistem akan mengancam keanekaragaman hayati.

1.5 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang menjadi isu strategis pada Dinas Perkebunan adalah :

- 1) Luas tanaman tua dan rusak semakin bertambah

Luas lahan perkebunan di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung berkurang akibat dari tanaman tua dan rusak (TTR) yang semakin bertambah. Terdapat TTR yang berkurang pada tahun berikutnya adalah karena dua kemungkinan, pertama telah dilakukan peremajaan kembali, dan kedua atau telah dikonversi tanamannya berubah menjadi tanaman jenis lainnya. Akibatnya luas tanam dan produksi mengalami penurunan serta adanya gangguan usaha dan konflik perkebunan;

- 2) Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
Rendahnya produktivitas akan berpengaruh pada produksi tanaman. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas perkebunan, antara lain sebagai berikut :

- a. Kebun dengan kondisi tanaman tua dan rusak (TTR) cukup luas;
- b. Belum optimalnya penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat
Penggunaan benih bermutu, pola dan jarak tanam, pengendalian hama penyakit serta pemupukan juga masih rendah.

- c. Belum terpenuhinya standar sarana produksi lainnya

Kondisi sebagian sarana dan prasarana perkebunan juga masih jauh dari yang diharapkan, baik berupa alat mesin pertanian maupun sarana pengairan serta jalan produksi kebun. Kondisi jalan produksi di perkebunan belum memadai sehingga menyebabkan ongkos angkut hasil panen perkebunan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.

- d. Belum terpenuhinya standar populasi tanaman per hektar;
 - e. Penerapan teknologi baik teknologi budidaya maupun panen dan pasca panen juga masih rendah, secara keseluruhan baru sekitar 60% dari anjuran yang ditetapkan.
 - f. Pengendalian OPT belum dilakukan secara terpadu dan ramah lingkungan;
 - g. Dukungan penerapan teknologi budidaya yang rendah;
 - h. Perubahan iklim.
 - i. Akses petani terhadap permodalan masih terbatas
- 3) Kapasitas dan Profesionalisme SDM aparatur belum memadai
- Petani merupakan SDM penting dalam pembangunan pertanian dan perkebunan, sehingga kemampuan SDM petani akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian hasil pembangunan. Petani perkebunan secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, juga dengan pendidikan formal yang sangat rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya SDM pertanian $\pm 80\%$ yang berusaha tani tamat SD ke bawah. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa petani lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan dari pada petani sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka kedepan peningkatan kapasitas petani sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan.
- 4). Usaha untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah produk masih belum berjalan secara maksimal sehingga berdasarkan NTP, manfaat kegiatan budidaya pertanian belum memberikan porsi yang besar bagi pendapatan petani, hal ini selain disebabkan karena produktifitas petani yang rendah, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal petani seperti fluktuasi harga, harga sarana produksi pertanian dan mekanisme pemasaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS OPD

Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 – 2024 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahun dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Riau berperan dalam mendukung terlaksananya Misi ke 3 (Tiga) yaitu **Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing** dan Misi ke 5 (Lima) yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

➤ Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Riau serta tugas pokok dan fungsi maka tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah : Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik;

1. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani perkebunan;

➤ Sasaran

Dengan mengacu tujuan maka sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan dan peningkatan kompetensi SDM petani

Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani perkebunan dengan menghitung pencapaian Nilai Tambah Usaha Perkebunan (NTUP), melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan

peningkatan kompetensi SDM petani, untuk itu capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Tahun 2019-2014 adalah :

1. Meningkatnya produksi tanaman utama (kelapa sawit, kelapa, karet, sagu)
2. Meningkatnya produktivitas tanaman utama (kelapa sawit, kelapa, karet, sagu)
3. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (aparatur dan petani)

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Gubernur sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Riau mempunyai tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan pembangunan perkebunan seperti Tabel 4 berikut :

Tabel 4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)			
Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan daya saing subsektor Perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun	1. Peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan
			2. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
			3. Terwujudnya fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
			4. Terwujudnya sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan

			5. Terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan
			6. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan yang lebih baik.
			7. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan
			8. Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan di tataran domestik dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing.
			9. Mendorong peningkatan kontribusi sub sektor perkebunan bagi pemerintah daerah
			10. Mendorong peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan perkebunan.
Meningkatkan pendapatan petani	Meningkatnya Nilai Tukar Petani	Peningkatan Luas Tanam	1. Peningkatan luas tanam perkebunan
			2. Peningkatan diversifikasi tanaman
		Peningkatan produktivitas	1. Tersedianya sarana pertanian
			2. Tersedianya prasarana pertanian
		Peningkatan Kompetensi SDM	1. Tersedianya petugas / kelembagaan yang berkompeten
			2. Tersedianya petani /kelembagaan yang berkompeten
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi			
Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD	1. Peningkatan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien
			2. Peningkatan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
			3. Peningkatan pelayanan publik bidang Perkebunan secara akuntabel dan profesional

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil maka disusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel. 5
Target Perjanjian Kinerja
Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET MURNI
1.	Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	67,59 (B)
2.	Meningkatkan pendapatan petani tanaman perkebunan	Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan	Jumlah produksi Komoditas Utama Perkebunan	
			- Kelapa sawit (ton)	8.071.651,6
			- Kelapa (ton)	391.457
			- Karet (ton)	384.855
			Produktivitas Tanaman Perkebunan	
			- Kelapa sawit (ton)	4,080
			- Kelapa (ton)	2,662
			- Karet (ton)	1,239
			- Sagu (ton)	7,690
			Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	3 %
			NTUP Perkebunan	100,10

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan, mengevaluasi dan mengukur kinerja.

Gambaran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran menjadi ukuran kinerja dapat dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dilakukan evaluasi dengan melakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Berdasarkan Lampiran VII Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dari tabel 6 diatas penilaian kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2021 setelah dilakukan evaluasi dengan melakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Penilaian Realisasi Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Penilaian realisasi kinerja
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas utama perkebunan	Produksi kelapa sawit (Ton CPO)	8.071.651,6	7.663.501	94,94	Sangat Tinggi
		Produksi kelapa (Ton kopra)	391.457	394.983	100,9	Sangat Tinggi
		Produksi karet (ton sheet)	384.855	435.123	113,06	Sangat Tinggi
		Produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit (kg/ha/th)	4,080	3,63	89	Tinggi
		Produktivitas tanaman perkebunan (kelapa) (kg/ha/th)	2,662	1,171	43,99	Sangat Rendah
		Produktivitas tanaman perkebunan (Karet) (kg/ha/th)	1,239	1,252	101,05	Sangat Tinggi
		Produktivitas tanaman perkebunan (sagu) (kg/ha/th)	7,690	6,340	82,44	Tinggi
		Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	3 %	0,3	10	Sangat Rendah

Berdasarkan Tabel 7 yaitu realisasi capaian kinerja tahun 2021 terhadap penilaian realisasi kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. Hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan katagori kinerja *Sangat Tinggi*, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud tranparansi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pemerintah Daerah Riau (Gubernur) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

- Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas utama perkebunan

Dengan mengukur jumlah produksi dan produktivitas komoditas utama tanaman perkebunan (data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2021)

- ❖ Capaian Produksi kelapa sawit jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2021 dikategorikan *Tinggi* atau mencapai 94,94 %. Walaupun realisasi capaian kinerja dikategorikan tinggi namun realisasi capaian kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan karena banyaknya kebun kelapa sawit yang tua rusak (TTR), adanya peremajaan kebun kelapa sawit di Provinsi Riau melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan menurunnya produktivitas, sehingga jumlah produksi berkurang
- ❖ Capaian Produksi kelapa jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2021 dikategorikan *Sangat Tinggi* atau mencapai 100,90 %. Realisasi capaian kinerja dikategorikan Sangat Tinggi ini akibat permintaan kelapa oleh masyarakat dimasa pandemi covid-19 sangat tinggi sehingga petani kelapa melakukan pemanenan kebun kelapanya
- ❖ Capaian Produksi Karet jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2021 dikategorikan Sangat Tinggi atau mencapai 113,06%. Realisasi capaian kinerja dikategorikan Sangat Tinggi ini disebabkan antara lain karena adanya peningkatan produktivitas. Terjadi peningkatan produktivitas bila dibandingkan tahun sebelumnya, dimana produktivitas karet tahun 2021 sebesar 1.252 kg/ha/th, sedangkan pada tahun 2020 produktivitas sebesar 1.240 kg/ha/th.
- ❖ Capaian produktivitas tanaman kelapa sawit jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2021 dikategorikan Tinggi atau mencapai 89%. Walaupun realisasi capaian kinerja dikategorikan tinggi namun realisasi capaian kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan banyaknya tanaman kelapa sawit dalam kondisi tua dan rusak,

yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah Tanaman Tua Rusak (TTR). Selain itu, banyak perkebunan kelapa sawit baik rakyat maupun perkebunan besar dalam kondisi peremajaan. Kondisi ini menyebabkan luas Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) meningkat, sedangkan luas Tanaman Menghasilkan (TM) menurun terutama untuk Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS). Penurunan luas TM ini menyebabkan berkurangnya produksi sehingga produktivitas pun berkurang. Selain itu disebabkan mahalnya harga saprodi (pupuk, pestisida, dll) sehingga perkebunan kelapa sawit rakyat kurang mendapat pemeliharaan sesuai teknisnya sehingga produktivitas perkebunan rakyat menurun

- ❖ Capaian produktivitas tanaman kelapa jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2021 dikategorikan *Sangat Rendah* atau capaiannya 43,99%. Rendahnya data produktivitas kelapa disebabkan terlalu tingginya dalam menetapkan target produktivitas kelapa dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 sebesar 2,662 kg/ha/th, sedangkan capaian produktivitas kelapa tahun 2021 sebesar 1,171 kg/ha/th (Sudah dilakukan revisi pada dokumen Perubahan Renstra 2020-2024)
- ❖ Capaian produktivitas tanaman karet jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2021 dikategorikan *Sangat Tinggi* atau capaiannya 101,05%. Capaian produktivitas tinggi disebabkan karena didukung oleh keadaan iklim yang sesuai, sehingga tanaman karet dapat berproduksi dengan baik
- ❖ Capaian produktivitas tanaman Sagu jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2021 dikategorikan Tinggi atau mencapai 82,44%, walaupun produktivitas sagu dikategorikan tinggi namun produktivitasnya tidak mencapai target perjanjian kerja disebabkan karena tanaman banyak yang sudah tua, rusak dan mati (TTR) serta terjadinya alih komoditi.
- ❖ Capaian Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditingkatkan kompetensinya jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2021 dikategorikan Sangat Rendah, yaitu hanya

mencapai 10%. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran karena adanya rasionalisasi.

3.1.1 Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 disajikan pada Tabel 8 berikut :

Tabel 8
Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja
Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020- 2021

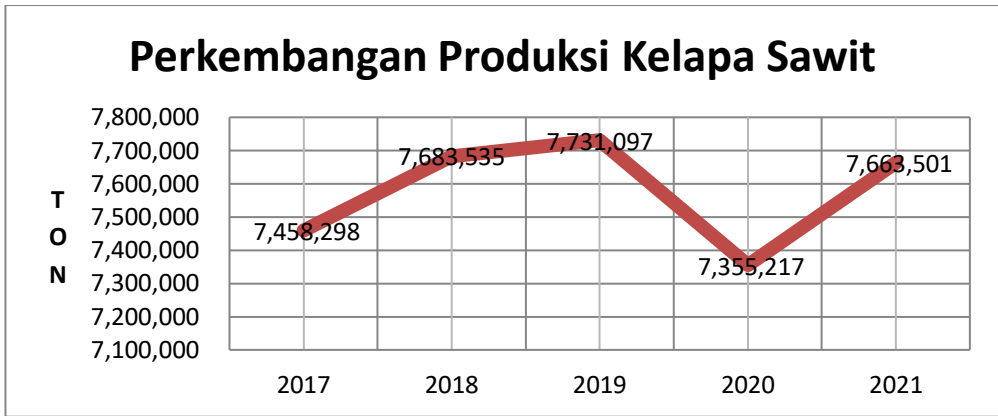
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target*	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya produksi komoditas utama perkebunan	Produksi kelapa sawit (Ton CPO)	7.918.313,2	7.355.217	92,88	8.071.651,6	7.663.501	94,94
		Produksi kelapa (Ton kopra)	389.457	396.373	101,71	391.457	394.983	100,90
		Produksi karet (ton sheet)	377.618,5	426.391	112,91	384.855	435.123	113,06
		Produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit (kg/ha/th)	4.020	3.469	86,62	4.080	3.63	89
		Produktivitas tanaman perkebunan (kelapa) (kg/ha/th)	2.649	1.415	57,31	2.662	1.171	43,99
		Produktivitas tanaman perkebunan (Karet) (kg/ha/th)	1.236	1.216	98,38	1,239	1.252	101,05
		Produktivitas tanaman perkebunan (sagu) (kg/ha/th)	7.609	6.390	83,97	7.690	6.340	82,44
		Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	3%	0%	0	3 %	0,3	10

Sumber data : Statistik Perkebunan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2021

Dari tabel 8 diatas evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 (Statistik Perkebunan Angka Sementara/ASEM) dengan tahun 2020 (Statistik Perkebunan Angka Tetap/ATAP) adalah sebagai sebagai berikut:

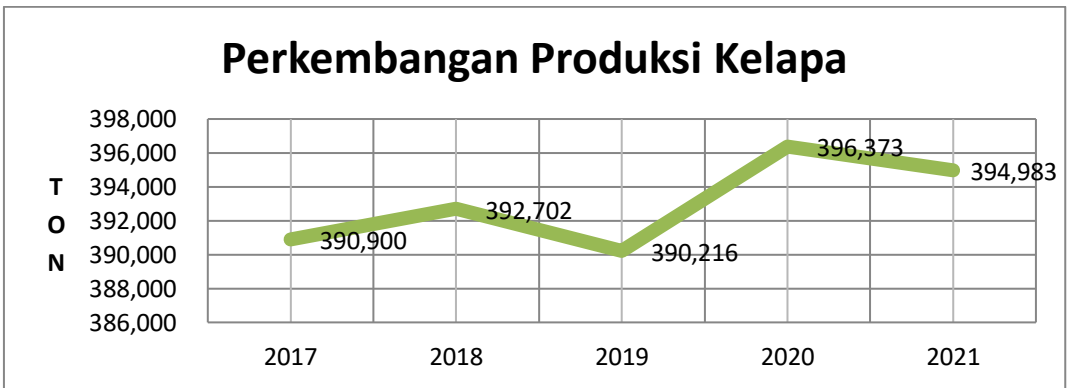
- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. Hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan tahun 2021 sebesar 100%, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pemerintah Daerah Riau (Gubernur) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Dinas Perkebunan provinsi Riau pada tahun 2020 memperoleh nilai sebesar **66,92 (kategori 'B')** dengan interpretasi **'Baik'**
- Peningkatan produksi komoditas utama perkebunan
 - ❖ Capaian realisasi produksi kelapa sawit tahun 2021 sebesar 7.663.501 ton CPO atau capaian kinerjanya 94,94% lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian realisasi produksi kelapa sawit tahun 2020 yaitu sebesar 7.355.217 ton CPO atau capaian kinerjanya 92,88%, peningkatan produksi kelapa sawit disebabkan karena kelapa sawit dari program PSR tahun tanam 2017-2018 seluas ± 8.966 ha sudah mulai berproduksi, selain itu disebabkan adanya peningkatan produktifitas kelapa sawit. Perkembangan Capaian realisasi produksi kelapa sawit dapat dilihat pada grafik 1 di bawah ini :

Grafik 1
Perkembangan Produksi Kelapa Sawit
Tahun 2017 s/d 2021



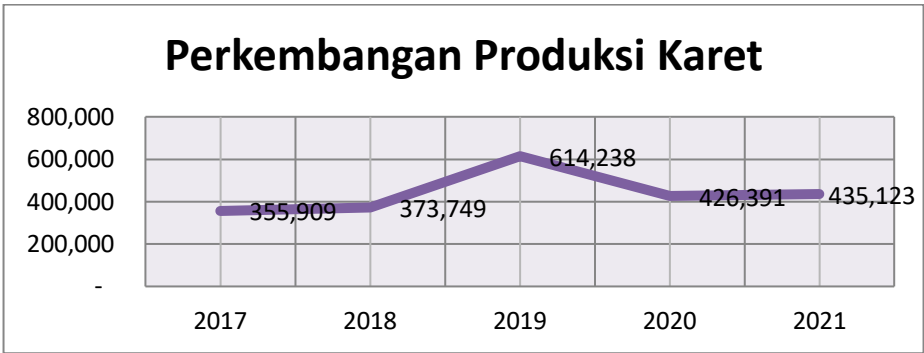
- ❖ Capaian realisasi produksi kelapa tahun 2021 sebesar 394.983 ton kopra atau capaian kinerjanya 100,90% melebihi target yaitu 391.457 ton, namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 realisasi produksi mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena menurunnya produktivitas akibat banyaknya kebun kelapa dalam kondisi tua rusak (TTR), sehingga jumlah produksi berkurang. Perkembangan Capaian realisasi produksi kelapa dapat dilihat pada grafik 2 di bawah ini :

Grafik 2
Perkembangan Produksi Kelapa
Tahun 2016 s/d 2021



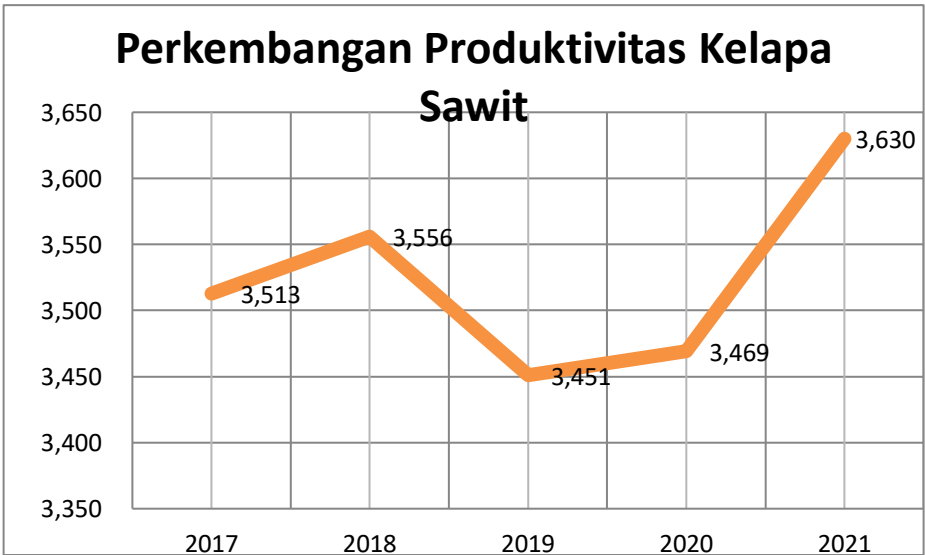
- ❖ Capaian realisasi produksi karet tahun 2021 sebesar 435.123 ton karet kering atau capaian kinerjanya 113,06% lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian realisasi produksi karet tahun 2020 yaitu sebesar 426.391 ton karet kering atau capaian kinerjanya 112,92%, hal ini disebabkan sesuai iklim/cuaca sehingga terjadi peningkatan produksi. Perkembangan Capaian realisasi produksi karet dapat dilihat pada grafik 3 di bawah ini :

Grafik 3
Perkembangan Produksi Karet
Tahun 2017 s/d 2021



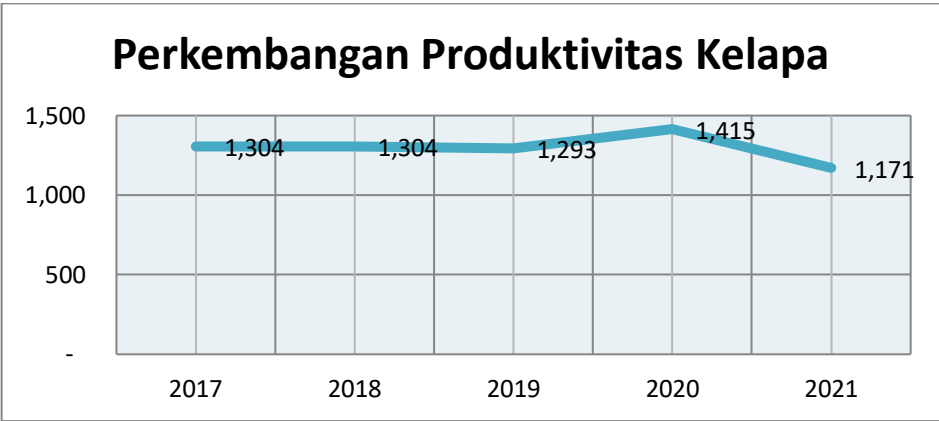
❖ Capaian realisasi produktivitas kelapa sawit tahun 2021 sebesar 3.930 kg/ha/th atau capaian kinerjanya 89% atau tidak mencapai target yaitu 4.080 kg/ha/th ton, namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 realisasi produktivitas mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena mahalnya harga saprodi (pupuk, pestisida,dll) sehingga perkebunan kelapa sawit rakyat, kurang mendapat pemeliharaan sesuai teknisnya sehingga produktivitas perkebunan rakyat menurun dan banyaknya tanaman kelapa sawit dalam kategori tanaman tua rusak (TTR). Perkembangan Capaian realisasi produktivitas kelapa sawit dapat dilihat pada grafik 4 di bawah ini :

Grafik 4
Perkembangan Produktivitas Kelapa Sawit
Tahun 2017 s/d 2021



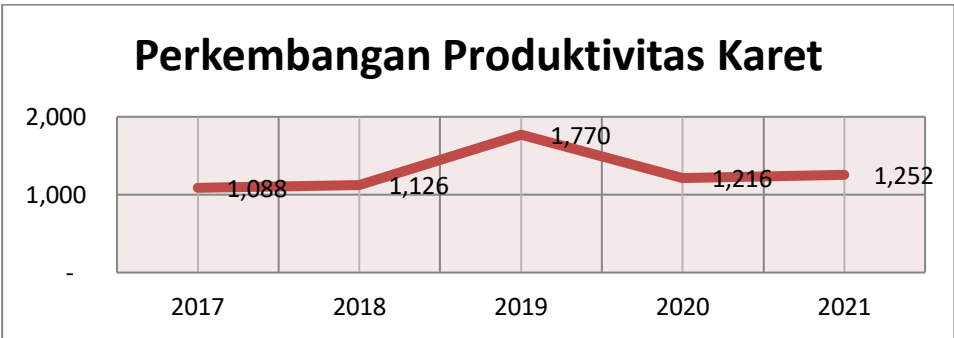
- ❖ Capaian produktivitas tanaman kelapa jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2021 dikategorikan Sangat Rendah atau mencapai 43,99%. Rendahnya produktivitas tanaman kelapa disebabkan terlalu tingginya dalam menetapkan target produktivitas kelapa dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 yaitu sebesar 2,662 kg/ha/th. Sedangkan capaian produktivitas kelapa Tahun 2021 sebesar 1.171 kg/h/th (43,99%), hal ini disebabkan karena petani tidak melakukan pemeliharaan sesuai teknis dan banyak tanaman kelapa di Provinsi Riau dalam kategori Tanaman Tua Rusak. Perkembangan Capaian realisasi produktivitas tanaman kelapa dapat dilihat pada grafik 5 di bawah ini :

Grafik 5
Perkembangan Produktivitas Kelapa
Tahun 2017 s/d 2021



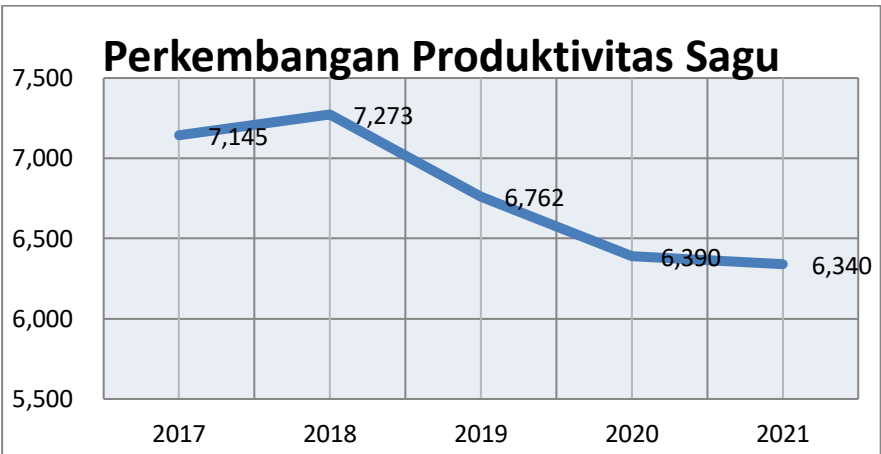
- ❖ Capaian realisasi produktivitas karet tahun 2021 sebesar 1.252 kg/ha/th karet kering atau capaian kinerjanya 101,05% lebih tinggi jika dibandingkan dengan target produktivitas tahun 2021 yaitu sebesar 1.239 kg/ha/th karet kering, hal ini disebabkan meningkatnya produksi karet akibat pengaruh iklim/cuaca yang baik sehingga produksi meningkat. Perkembangan Capaian realisasi produktifitas karet dapat dilihat pada grafik 6 di bawah ini :

Grafik 6
Perkembangan Produktivitas Karet
Tahun 2017 s/d 2021



- ❖ Capaian realisasi produktivitas sagu tahun 2021 sebesar 6.340 kg/ha/th tepung sagu atau capaian kinerjanya 82,44% lebih rendah jika dibandingkan dengan targetnya yaitu 7.690 kg/ha/th, hal ini disebabkan karena banyaknya tanaman tua rusak dan tidak terpelihara dengan baik. Perkembangan Capaian realisasi produktivitas sagu dapat dilihat pada grafik 6 di bawah ini :

Grafik 7
Perkembangan Produktivitas Sagu
Tahun 2017 s/d 2021



- ❖ Untuk Capaian Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditingkatkan kompetensinya Dinas Perkebunan provinsi Riau hanya tercapai 10 % dari target, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran karena adanya rekofusing anggaran

3.1.2 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Target Renstra OPD

Untuk mengetahui capaian kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2024, perlu dilakukan komparasi pencapaian kinerja tahun 2021 dengan target akhir Renstra dan RPJMD tahun 2021, yang disajikan pada Tabel 9 berikut :

Tabel 9
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perkebunan Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra Tahun 2024	Realisasi Tahun 2021	Capaian tahun 2021 terhadap target akhir
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100
2	Meningkatnya produksi komoditas utama perkebunan	Produksi kelapa sawit (Ton CPO)	8.531.666	7.663.501	89,82
		Produksi kelapa (Ton kopra)	397.457	394.983	99,38
		Produksi karet (ton sheet)	406.564,5	435.123	107,02
		Produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit (kg/ha/th)	4,260	3,63	85,21
		Produktivitas tanaman perkebunan (kelapa) (kg/ha/th)	2,703	1,171	43,32
		Produktivitas tanaman perkebunan (Karet) (kg/ha/th)	1,271	1,252	98,50
		Produktivitas tanaman perkebunan (sagu) (kg/ha/th)	8.003	6,340	79,22
		Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	3 %	0,3	10

Data pada Tabel 9 perbandingan capaian indikator kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2021 dengan target akhir Renstra 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pemerintah Daerah Riau (Gubernur) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

- Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas utama perkebunan
 - ❖ Capaian Produksi kelapa sawit jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2024 dikategorikan *Tinggi* atau mencapai 89,82 %. Faktor yang menyebabkan produksi kelapa sawit belum memenuhi target karena banyaknya kebun kelapa sawit yang tua rusak (TTR), adanya peremajaan kebun kelapa sawit di Provinsi Riau melalui program Peremajaan Kelapa Sawit (PRS) dan menurunnya produktivitas, sehingga jumlah produksi berkurang
 - ❖ Capaian Produksi kelapa jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2024 dikategorikan *Sangat Tinggi* atau mencapai 99,38 %. Faktor yang menyebabkan produksi kelapa telah memenuhi target akibat permintaan kelapa oleh masyarakat dimasa pandemi covid-19 sangat tinggi sehingga petani kelapa melakukan pemanenan kebun kelapanya
 - ❖ Capaian Produksi Karet jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2024 dikategorikan Sangat Tinggi atau mencapai 107,02%. Faktor yang menyebabkan produksi karet memenuhi target karena adanya peningkatan produktivitas.
 - ❖ Capaian produktivitas tanaman kelapa sawit jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2024 dikategorikan Tinggi atau mencapai 85,21%. Faktor yang menyebabkan produktivitas kelapa sawit belum memenuhi target disebabkan banyaknya tanaman kelapa sawit dalam kondisi tua dan rusak, yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah Tanaman Tua Rusak (TTR). Selain itu, banyak perkebunan kelapa sawit baik rakyat maupun perkebunan besar dalam kondisi peremajaan. Kondisi ini menyebabkan luas Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) meningkat, sedangkan luas Tanaman Menghasilkan (TM) menurun terutama untuk Perkebunan Besar Negara/Swasta (PBN/PBS). Penurunan luas TM ini menyebabkan berkurangnya

produksi sehingga produktivitas pun berkurang. Selain itu disebabkan mahalanya harga saprodi (pupuk, pestisida, dll) sehingga perkebunan kelapa sawit rakyat kurang mendapat pemeliharaan sesuai teknisnya sehingga produktivitas perkebunan rakyat menurun

- ❖ Capaian produktivitas tanaman kelapa jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2024 dikategorikan *Sangat Rendah* atau capaiannya 43,32%. Faktor yang menyebabkan produktivitas kelapa belum memenuhi target disebabkan terlalu tingginya dalam menetapkan target produktivitas kelapa dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 sebesar 2,662 kg/ha/th, sedangkan capaian produktifitas kelapa Nasional tahun 2021 sebesar 1,140 kg/ha/th (Sudah dilakukan revisi pada dokumen Perubahan Renstra 2020-2024)
- ❖ Capaian produktivitas tanaman karet jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2024 dikategorikan *Sangat Tinggi* atau capaiannya 98,50%. Faktor yang menyebabkan produktivitas karet memenuhi target karena didukung oleh keadaan iklim yang sesuai, sehingga tanaman karet dapat berproduksi dengan baik
- ❖ Capaian produktivitas tanaman Sagu jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2024 dikategorikan *Tinggi* atau mencapai 79,22%, Faktor yang menyebabkan produksi sagu belum memenuhi target disebabkan karena tanaman banyak yang sudah tua, rusak dan mati (TTR) serta terjadinya alih komoditi.
- ❖ Capaian Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditingkatkan kompetensinya jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2024 dikategorikan *Sangat Rendah*, yaitu hanya mencapai 10%. Faktor yang menyebabkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditingkatkan kompetensinya belum memenuhi target disebabkan keterbatasan anggaran karena adanya rasionalisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Tahun 2021 yang ditingkatkan kompetensinya Dinas Perkebunan provinsi Riau hanya tercapai 10 % dari target, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran karena adanya rekofusing anggaran

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Untuk mengetahui capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 (Data : Statistik Perkebunan Dalam Angka Sementara/ASEM Tahun 2021) bila dibandingkan dengan capaian realisasi tingkat nasional (Data : Statistik Perkebunan Dalam Angka Sementara/ASEM Pusdatin Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2021), dapat disajikan pada Tabel 10 berikut :

Tabel 10
Realisasi Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau
dibandingkan dengan Capaian Tingkat Nasional Tahun 2021

No	Uraian	Provinsi Riau	Nasional	% Capaian
1	Produksi kelapa sawit (Ton CPO)	7.663.501	49.710.344	15,41
2	Produksi kelapa (Ton kopra)	394.983	2.859.515	13,81
3	Produksi karet (ton sheet)	435.123	3.135.208	13,87
4	Produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit (kg/ha/th)	3.630	3.947	91,97
5	Produktivitas tanaman perkebunan (kelapa) (kg/ha/th)	1.171	1.140	102,71
6	Produktivitas tanaman perkebunan (Karet) (kg/ha/th)	1.252	1,023	122,38
7	Produktivitas tanaman perkebunan (sagu) (kg/ha/th)	6,340	2.929	216,45

Sumber data : Statistik Perkebunan Dalam Angka Sementara/ASEM Tahun 2021 (Provinsi)
Statistik Perkebunan Dalam Angka Sementara/ASEM Tahun 2021 Pusdatin Dirjenbun (Nasional)

Data pada Tabel perbandingan capaian indikator kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 dengan capaian tingkat nasional (Pusdatin Dirjenbun) Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Komoditi Kelapa Sawit

Bila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional, capaian produksi komoditi kelapa sawit di Provinsi Riau sebesar 15,41% Dimana Provinsi Riau menempati tingkat pertama produksi kelapa sawit terbanyak di Indonesia, yang diikuti provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk produktivitas kelapa sawit di Provinsi Riau masih rendah bila dibandingkan dengan tingkat nasional, sehingga perlu adanya upaya untuk peningkatan produktivitas kelapa sawit melalui peningkatan usaha budidaya kelapa sawit sesuai dengan standar teknisnya

- **Komoditi Kelapa**

Bila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional, capaian produksi komoditi kelapa di Provinsi Riau sebesar 13,81%, Dimana Provinsi Riau menempati tingkat pertama produksi kelapa terbanyak di Indonesia yang diikuti provinsi Sulawesi Utara dan Jawa Timur. Sedangkan untuk produktivitas kelapa di Provinsi Riau lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat nasional, walaupun demikian masih banyak persoalan kelapa di Riau dari hulu hingga hilir, mulai dari intrusi air laut yang sangat besar karena tanggul penahan jebol, drainase wadah transpotasi pengangkut kelapa banyak yang rusak, selain itu tanaman kelapa sudah banyak yang tua sehingga perlu melakukan replanting kebun kelapa yang tua dan rusak, dan juga diperlukan pengembangan pengolahan kelapa yang bisa menghasilkan produk turunan antara lain minyak kelapa, sabut kelapa, briket arang, arang aktif, serta menyediakan akses pasar dan perlunya ketetapan harga pembelian kelapa petani.

- **Komoditi Karet**

Bila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional, capaian produksi komoditi karet di Provinsi Riau sebesar 13,87%, dimana Provinsi Riau menempati tingkat ke tiga produksi karet terbanyak di Indonesia, dimana produksi karet terbanyak di provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau dan Jambi. Sedangkan untuk produktivitas karet di Provinsi Riau lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat nasional. Walaupun demikian produksi karet di Provinsi Riau perlu ditingkatkan melalui program penanaman kembali (replant) atau revitalisasi pohon karet karena pohon karet yang ada saat ini sudah terbilang cukup tua dan tidak produktif.

- **Komoditi Sagu**

Bila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional, capaian produksi komoditi sagu di Provinsi Riau sebesar 71,52% Dimana Provinsi Riau menempati tingkat pertama produksi sagu terbanyak di Indonesia, yang diikuti provinsi Papua dan Maluku. Sedangkan untuk produktivitas sagu di Provinsi Riau lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat nasional. Kendala petani dalam usaha sagu antara lain waktu panen yang cukup lama, teknik budidaya sagu yang belum intensif, dan pengelolaan kebun belum maksimal. Semua kendala tersebut menghambat petani untuk mau melakukan budidaya tanaman sagu, karena saat menunggu panen yang terlalu lama tidak diikuti dengan pendapatan petani yang memadai

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

3.1.4.1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

- a. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja OPD dengan melaksanakan program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pemerintah Daerah Riau (Gubernur) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

3.1.4.2 Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas utama perkebunan

- a. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produksi komoditas utama perkebunan untuk pencapaian keberhasilan kinerja OPD dengan strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan baik intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi

perkebunan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran.

b. Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 antara lain :

- Masih kurangnya tenaga penyuluh perkebunan, di kabupaten/kota se- Provinsi Riau
- Belum semua kabupaten/kota mengadakan pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Tidak tersedianya anggaran transportasi untuk tenaga pendamping dari dinas kabupaten/kota, dalam rangka pelaksanaan validasi ke lapangan
- Kurangnya masa kontrak tenaga ahli gis dalam pelaksanaan kegiatan
- Luasnya wilayah dan keterbatasan dukungan dana APBD/APBN sehingga belum berikan hasil yang komprehensif
- Besarnya animo masyarakat terhadap pengadaan bibit kelapa sawit bersubsidi tetapi belum dapat kita penuhi karena keterbatasan anggaran
- Kelompok tani yang diusulkan (POKIR) permohonan tidak sesuai dengan persyaratan dan lokasi berada di dalam kawasan
- Kesalahan dalam memasukan rekening dari belanja bahan kimia menjadi belanja yang diserahkan kepada masyarakat
- Tidak tersedianya anggaran transportasi dari ibukota kabupaten ke lokasi (desa/kecamatan)

c. Solusi yang dilakukan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 dalam mengatasi masalah adalah :

- Pengembangan penyuluh perkebunan dari penyuluh swadaya dan swasta
- Menambah jumlah pelatihan minimal satu jenis pelatihan untuk satu kabupaten sesuai dengan komoditas unggulan dari kabupaten/kota tersebut
- Agar dianggarkan biaya transportasi untuk tenaga pendamping dari dinas kabupaten/kota untuk mendampingi petugas dinas provinsi melaksanakan validasi ke lapangan
- Agar ditambahkan biaya untuk memperpanjang masa kontrak tenaga ahli gis dalam pelaksanaan kegiatan
- Penambahan anggaran kegiatan
- Kelompok tani yang diusulkan (POKIR) permohonan tidak sesuai dengan persyaratan dan lokasi berada di dalam kawasan
- Agar pengusulan kelompok tani sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dan lokasi berada di luar kawasan
- Dilakukan perubahan pada APBD-P
- Penambahan anggaran untuk transportasi ke lokasi

3.1.4.3 Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pencapaian keberhasilan kinerja OPD dengan melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan agar terwujud komoditas unggulan daerah yang berkualitas, tangguh dan mampu bersaing dalam era pasar bebas baik pasar global. Selain itu aspek penyuluhan akan memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan inovasi petani/pekebun

- b. Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah terbatasnya anggaran akibat pandemi covid-19 (recofusing) dan terbatasnya kegiatan yang terakomodir dalam Renstra Dinas sehingga banyak kegiatan tidak tertampung dalam Renstra Dinas dan RPJMD
- c. Solusi yang dilakukan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam mengatasi masalah tersebut dengan revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Riau

3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui penggunaan sumber daya pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11
Capaian Realisasi Program dan Kegiatan dan Anggaran
Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		Capaian Kinerja %	ANGGARAN			
			TARGET	REALISASI		PAGU KEGIATAN		REALISASI	% CAPAIAN
1		2	4	5		6		7	8
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 23.037.443.584	20.522.156.173,19	89,08
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 17.822.716.327	16.183.382.430,00	90,80
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 17.822.716.327	16.183.382.430,00	90,80
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 33.769.725	25.687.225,00	76,07
						Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 33.769.725	25.687.225,00	76,07
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 102.725.000	93.514.000	91,03
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 102.725.000	93.514.000	91,03
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.617.793.708	1.246.910.884,00	77,07
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 22.677.679	22.324.720,00	98,44

						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	700.874.247	659.253.020,00	94,06
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	117.393.490	84.625.000,00	72,09
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	90.469.457	77.424.410,00	85,58
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	686.378.835	403.283.734,00	58,76
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	324.438.108	305.570.195,00	94,18
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	324.438.108	305.570.195,00	94,18
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2.267.958.251	2.062.157.044,00	90,93
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	15.100.000	10.000.000,00	66,23
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	442.698.560	348.582.104,00	78,74
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1.810.159.691	1.703.574.940,00	94,11
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	868.042.465	604.934.395,19	69,69

						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	329.163.850	328.498.500,00	99,80
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	45.975.000	39.052.059,00	84,94
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaSub Kegiatan	Rp	492.903.615	237.383.836,19	48,16
I	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan	Jumlah produksi :				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp	612.807.907	474.592.388	77,45
		1. Kelapa sawit	8.071.651,60	7.663.501	94,94	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Rp	225.690.000	101.327.000	44,90
		2. kelapa	391.457,00	394.983	100,90	Sub Kegiatan Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	Rp	225.690.000	101.327.000	44,90
		3. karet	384.855,00	435.123	113,06	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Rp	387.117.907	373.265.388	96,42
						Sub Kegiatan Pengelolaam penerbitan sertifikasi benih	Rp	387.117.907	373.265.388	96,42
	Jumlah produktivitas komoditas utama perkebunan					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp	400.789.576	352.643.311	87,99

	Jumlah produktivitas				Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Rp	400.789.576	352.643.311	87,99
	1. Kelapa sawit (kg)	4.080,00	3.628	88,92	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Rp	400.789.576	352.643.311	87,99
	2. kelapa	2.662	1.171	43,99					
	3. karet	1.239	1.252	101,05					
	4. Sagu	7.690	6.340	82,44					
	Persentase luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana	-	-	-	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		85.930.931	70.619.720	82,18
					Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Rp	85.930.931	70.619.720	82,18
					Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp	85.930.931	70.619.720	82,18
	Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin	-	-	-	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp	129.155.870	106.316.370	82,32
					Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp	129.155.870	106.316.370	82,32

						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Rp 129.155.870	106.316.370	82,32
II	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	3 %	0,3 %		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 66.112.872	51.361.750	77,69
						Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Rp 23.410.000	11.577.500	49,46
						Sub Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Rp 23.410.000	11.577.500	49,46
						Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Rp 42.702.872	39.784.250	93,17
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Rp 42.702.872	39.784.250	93,17
						Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Rp -	-	0,00
						Sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Rp -	-	0,00

Dari sajian Tabel 11 diatas, pelaksanaan Dinas Perkebunan sebagai berikut :

- Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2021 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) memiliki total anggaran sebesar Rp.27.324.240.740,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.
- Belanja Operasi untuk belanja pegawai sebesar Rp.17.822.716.327,- (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.5.664.693.891,- (Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)
- Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.263.883.022,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Dua Rupiah) dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.439.147.500,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) yang mencakup sebanyak 5 program, 15 kegiatan dan 23 sub kegiatan
- Efisiensi penggunaan sumberdaya Dinas Perkebunan dalam pencapaian kinerja berdasarkan target Renja Tahun 2021 sebagai berikut :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, penilaian kinerja dengan nilai 89,08% dengan capaian realisasi kinerja dalam kategori predikat kinerja *Tinggi* , hal ini berarti program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk peningkatan kinerja ASN dan pelayanan public dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, penilaian kinerja dengan nilai 77,45% dengan capaian realisasi kinerja dalam kategori predikat kinerja *Tinggi* , hal ini berarti program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk peningkatan produksi komoditi utama perkebunan

- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, penilaian kinerja dengan nilai 87,99% dengan capaian realisasi kinerja dalam kategori predikat kinerja *Tinggi* , hal ini berarti program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk peningkatan produktivitas komoditi utama perkebunan
- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, penilaian kinerja dengan nilai 82,18% dengan capaian realisasi kinerja dalam kategori predikat kinerja *Tinggi* , hal ini berarti program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk peningkatan produktivitas komoditi utama perkebunan
- Program Perizinan Usaha Pertanian, penilaian kinerja dengan nilai 82,32% dengan capaian realisasi kinerja dalam kategori predikat kinerja *Tinggi* , hal ini berarti program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk peningkatan produktivitas komoditi utama perkebunan
- Program Penyuluhan Pertanian, penilaian kinerja dengan nilai 77,69% dengan capaian realisasi kinerja dalam kategori predikat kinerja *Tinggi* , hal ini berarti program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi SDN petani dan aparatur

3.1.6 Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada Tahun 2021 dianggarkan melalui sumber dana APBD dan APBN baik dana alokasi Tugas Pembantuan (TP) maupun Dekonsentrasi. Adapun faktor-faktor program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau antara lain, sebagai berikut :

- Tersedianya Sumberdaya manusia (ASN Dinas Perkebunan) yang telah melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat (Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel)

- Potensi sumberdaya tanaman perkebunan masih dapat ditingkatkan;
- Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri;
- Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif;
- Meningkatnya kebutuhan bahan pangan;
- Adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari dana BPDPKS
- Adanya kebijakan yang memuat Peraturan/Keputusan Kepala Daerah atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut :

Tabel. 12
Kebijakan Strategis Penyelesaian
Masalah Strategis Perkebunan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan yang lebih baik.	Peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 2020 tentang Tata Cara Pentapan Harga	Fasilitasi penumbuhan dan pembinaan kelembagaan pekebun swadaya komoditi kelapa sawit
2	Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan di tataran domestik dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing	Pembenlian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau	Fasilitasi pemasaran komoditi kelapa sawit berupa TBS kelapa sawit

Sedangkan faktor-faktor penyebab kegagalan capaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian indikator sasaran antara lain sebagai berikut :

- Anggaran program/kegiatan/sub kegiatan melalui sumber dana APBD, target kinerja tidak tercapai sesuai yang telah direncanakan karena adanya pergeseran dan penghapusan anggaran (rasionalisasi anggaran).
- Keterbatasan anggaran hal ini disebabkan karena anggaran program/kegiatan/sub kegiatan digunakan dalam mendukung Pemerintah Daerah untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

- Terlalu tingginya dalam menetapkan target produktivitas komoditas kelapa dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2019-2024
- Masih banyaknya komoditas tanaman utama perkebunan tua rusak (TTR) sehingga menurunnya produktivitas, menyebabkan jumlah produksi berkurang
- Adanya peremajaan kebun kelapa sawit di Provinsi Riau melalui program Peremajaan Kelapa Sawit (PRS) sehingga berkurangnya jumlah produksi (tanaman belum menghasilkan)

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau yaitu meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani perkebunan yang diukur dengan indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) sektor Perkebunan.

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yaitu rasio indeks harga yang diterima petani dari usaha perkebunan dengan indeks harga yang dibayarkan petani untuk pengeluaran usaha perkebunan. Artinya NTUP di atas 100 menunjukkan petani surplus, sama dengan 100 berarti impas dan di bawah 100 berarti petani rugi/defisi.

NTUP Perkebunan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pada Tahun 2021 sebesar 149,56 , ini menunjukkan bahwa usaha petani sub sektor perkebunan surplus yang berarti petani yang melakukan usaha perkebunan dapat meningkat pendapatannya sehingga dapat menambah kesejahteraan keluarganya. Kenaikan NTUP sub sektor perkebunan ditopang oleh berbagai fasilitas pendukung antara lain adanya kenaikan harga jual hasil komoditi perkebunan.

Dalam pelaksanaan urusan perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dilaksanakan melalui sumber dana APBD dan APBN. Untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

❖ ANGGARAN APBD

Pada tahun 2021 urusan perkebunan dilaksanakan melalui 5 program, 15 kegiatan dan 23 sub kegiatan, dengan pagu anggaran yang ditetapkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) memiliki total anggaran sebesar Rp.27.324.240.740,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi untuk belanja pegawai sebesar Rp.17.822.716.327,- (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.5.664.693.891,- (Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), serta Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.2.263.883.022,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Dua Rupiah) dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.1.439.147.500,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 2.824.411.994,- (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.23.039.349.527,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 84,32% dengan realisasi fisik sebesar 93,31 %. Adapun capaian realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 13 berikut :

Tabel 13
Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	PROGRES KEUANGAN		
			REALISASI	% KEU	% FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	4	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.037.443.584	20.522.156.173,19	89,08	100,00
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.822.716.327	16.183.382.430,00	90,80	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.822.716.327	16.183.382.430,00	90,80	100,00
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.769.725	25.687.225,00	76,07	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.769.725	25.687.225,00	76,07	100,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.725.000	93.514.000	91,03	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	102.725.000	93.514.000	91,03	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.617.793.708	1.246.910.884,00	77,07	100,00
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.677.679	22.324.720,00	98,44	100,00
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	700.874.247	659.253.020,00	94,06	100,00
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.393.490	84.625.000,00	72,09	100,00
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.469.457	77.424.410,00	85,58	100,00
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	686.378.835	403.283.734,00	58,76	100,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	324.438.108	305.570.195,00	94,18	100,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	324.438.108	305.570.195,00	94,18	100,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.267.958.251	2.062.157.044,00	90,93	100,00
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.100.000	10.000.000,00	66,23	100,00
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	442.698.560	348.582.104,00	78,74	100,00
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.810.159.691	1.703.574.940,00	94,11	100,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	868.042.465	604.934.395,19	69,69	100,00

a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	329.163.850	328.498.500,00	99,80	100,00
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.975.000	39.052.059,00	84,94	100,00
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	492.903.615	237.383.836,19	48,16	100,00
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	612.807.907	474.592.388	77,45	91,67
1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	225.690.000	101.327.000	44,90	85,12
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	225.690.000	101.327.000	44,90	80,12
2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	387.117.907	373.265.388	96,42	98,21
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	387.117.907	373.265.388	96,42	98,21
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.392.789.576	352.643.311	10,39	92,99
1	Penataan Prasarana Pertanian	3.392.789.576	352.643.311	10,39	92,99
a.	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	400.789.576	352.643.311	87,99	92,99
b.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	-	-	-	-
c.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	-	-	-
IV	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	85.930.931	70.619.720	82,18	100,00
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	85.930.931	70.619.720	82,18	100,00
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	85.930.931	70.619.720	82,18	100,00
V	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	129.155.870	106.613.370	82,55	98,39
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota	129.155.870	106.613.370	82,55	98,39
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	129.155.870	106.613.370	82,55	98,39
VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	66.112.872	51.361.750	77,69	100,00
1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	23.410.000	11.577.500	49,46	100,00

	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	23.410.000	11.577.500	49,46	100,00
2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	42.702.872	39.784.250	93,17	100,00
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	42.702.872	39.784.250	93,17	100,00
3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-	0,00	-
	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	-	-	0,00	-
VII	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (DAK)	2.992.000.000	1.461.362.815	48,84	70,15
1	Penataan Prasarana Pertanian	2.992.000.000	1.461.362.815	48,84	70,15
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	2.992.000.000	1.461.362.815	48,84	70,15
JUMLAH		27.324.240.740	23.039.349.527,40	84,32	93,31

Dari tabel 13 dapat dirincikan sebagai berikut :

❖ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dengan target 103 orang bulan sudah terealisasi sebanyak 103 orang bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.522.156173,- atau 89,08%. Realisasi tidak mencapai 100 % karena kelebihan dari anggaran tambahan penghasilan prestasi kerja dan adanya pindah tugas ASN maupun purna tugas ASN

2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Dengan target 1 persen sudah terealisasi sebanyak 1 persen atau sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 25.687.225,- (76,07%)

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Dengan target 142 stel sudah terealisasi sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 93.514.000,- (91,03%)

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dengan target 15 jenis sudah terealisasi sebanyak 15 jenis atau sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 22.324.720,- (93,33%)

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dengan target 45 unit sudah terealisasi sebanyak 45 unit rekening atau sebesar 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 659.253.020,- (94,06 %)

3. Penyediaan bahan logistik kantor

Dengan target 6.719 porsi sudah terealisasi sebanyak 4.740 porsi atau sebesar 70,55% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.625.000,- (72,09%)

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dengan target 38 jenis sudah terealisasi sebanyak 38 jenis atau sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 77.424.410,- (85,58%)

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dengan target 290 kali sudah terealisasi sebanyak 175 kali atau sebesar 60,34% dengan anggaran sebesar Rp. 403.283.734,- (58,76%)

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dengan target 80 unit sudah terealisasi sebanyak 80 unit atau sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 305.570.195,- (94,18%)

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dengan target 1.204 surat sudah terealisasi sebanyak 795 porsi atau sebesar 66,03% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (66,23%)

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dengan target 12 rekening sudah terealisasi sebanyak 12 rekening atau sebesar 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 348.582.104,- (78,74 %)

3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Dengan target 622 OB sudah terealisasi sebanyak 622 OB atau sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.703.574.940,- (94,11%)

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dengan target 10 unit sudah terealisasi sebanyak 10 unit atau sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 328.498.500,- (99,80%)

2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Dengan target 18 unit sudah terealisasi sebanyak 18 unit atau sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 39.052.059,- (84,94%)

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dengan target 2 ruang sudah terealisasi sebanyak 1 ruang atau sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp. 237.383.836,- (64,21%)

❖ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

1. Sub kegiatan Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian

Anggaran yang terserap sejumlah Rp. 101.327.000,- atau 44,90%, yang dilaksanakan hanya 3 kelompok tani dari

yang ditargetkan sebanyak 6 kelompok tani disebabkan kelompok tani tersebut tidak memenuhi persyaratan baik administrasi maupun lahan.

2. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

1. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih

Dengan target 53.000 bibit, sudah terealisasi sebanyak 49.909 bibit atau sebesar 94,17% dengan anggaran sebesar Rp. 373.265.388,- (96,42%)

❖ PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian

1. Sub Kegiatan Pengendalian dan pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian

Dengan target 6.500 bibit kelapa, sudah terealisasi sebanyak 6.500 bibit kelapa (seluas 50 ha) atau sebesar 80% dengan anggaran sebesar Rp. 352.643.311,- (87,99%)

2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (tidak dapat dilaksanakan hasil pembahasan pergeseran ke IV dan anggaran kegiatan di nol kan / dihapus pada APBD-P)

3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana pendukung pertanian lainnya (tidak dapat dilaksanakan hasil pembahasan pergeseran ke IV dan anggaran kegiatan di nol kan / dihapus pada APBD-P)

❖ PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

1. Kegiatan Pengendalin dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Dengan target 100 Ha, sudah terealisasi sebanyak 82 Ha atau sebesar 82 % dengan anggaran sebesar Rp. 70.619.720,- (82,18%)

❖ **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota

1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

Dengan target 9 Perusahaan, sudah terealisasi sebanyak 9 Perusahaan atau sebesar 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 106.613.370,- (82,55%)

❖ **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

1. Kegiatan pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

1. Sub kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta

Dengan target 7 lembaga, sudah terealisasi sebanyak 7 lembaga atau sebesar 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 11.577.500,- (49,46%)

2. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

1. Sub kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

Dengan target 50 orang, sudah terealisasi sebanyak 50 orang atau sebesar 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 39.784.250,- (93,17%)

3. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

1. Sub kegiatan Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani pada APBD-Perubahan anggaran dirasionalisasi

❖ **DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (DAK)

Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya, dengan target 1 unit,

sudah terealisasi fisik 50% dengan anggaran sebesar Rp. 1.461.362.815,- (48,84%), dari pelaksanaan sub kegiatan yang dilaksanakan berupa pembangunan gedung UPT Produksi Tanaman Perkebunan, sedangkan belanja modal pengadaan laboratorium tidak dilaksanakan dikarenakan Gedung Laboratorium masih dalam proses pekerjaan Fisik

❖ **ANGGARAN APBN**

Untuk pelaksanaan urusan perkebunan pada anggaran APBN dilaksanakan melalui alokasi dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi sebagai berikut :

• **DANA DEKONSENTRASI**

Adapun realisasi alokasi dana APBN Dekonsentrasi sebesar Rp. 1.122.623.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tuga Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran dana dekonsentrasi sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.105.377.000,- (98,46 %) dengan realisasi fisik sebesar 99,86%. Realisasi pelaksanaan anggaran APBN alokasi dapat dilihat pada tabel 14 berikut :

Tabel 14
Realisasi Anggaran APBN Dinas Perkebunan Provinsi Riau
dana DEKONSENTRASI Tahun 2021

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	% KEU	% FISIK
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	175.500.000	175.260.000	99,86	100,00
1	Penguatan Perlindungan Perkebunan	175.500.000	175.260.000	99,86	100,00
II	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	482.450.000	480.719.700	99,64	100,00
1	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perkebunan	482.450.000	480.719.700	99,64	100,00
JUMLAH		657.950.000	655.979.700	99,75	100,00

Dana DK APBN Tahun 2021 Dinas Perkebunan Provinsi Riau hampir seluruh kegiatannya telah dilaksanakan dengan baik. Ini tercermin dari realisasi keuangan mencapai 99,75% dan realisasi fisik 100%. Penilaian kinerja Dana DK APBN dengan nilai sebesar 99,75% dengan capaian realisasi kinerja dalam kategori predikat kinerja *Tinggi* , hal ini berarti program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk peningkatan kinerja Dinas Perkebunan dan peningkatan produktivitas komoditi utama perkebunan.

Adapun hal yang perlu menjadi perhatian kedepan adalah anggaran dukungan pelaksanaan statistik perkebunan perlu adanya penambahan anggaran hal ini disebabkan belum tersedianya dana untuk pertemuan sinkronisasi dan validasi data statistik perkebunan untuk penyusunan Angka Sementara (ASEM) dan Angka Tetap (ATAP) dan belum semua petugas kecamatan (Mantri statistik) yang mendapat insentif, dari 161 kecamatan di Provinsi Riau hanya 155 kecamatan yang mendapat insentif, selain itu anggaran dukungan perlindungan yang meliputi penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman perkebunan yang masih relatif kecil dibandingkan dengan luas serta intensitas serangan yang sering terjadi. Hal ini mengakibatkan serangan OPT yang terjadi di Provinsi Riau belum tertangani secara optimal.

• **DANA TUGAS PEMBANTUAN**

Adapun kinerja dana TP APBN Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 15 sebagai berikut :

Tabel 15
Realisasi Anggaran APBN Dinas Perkebunan Provinsi Riau
dana TUGAS PEMBANTUAN Tahun 2021

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI		
		MURNI	KEUANGAN		REALISASI
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.801.376.000	1.599.788.418,00	88,81	95,64

1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	496.805.000	480.584.100,00	96,73	98,73
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	170.625.000	155.720.100,00	91,26	97,16
5889	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	752.350.000	601.013.363,00	79,88	87,88
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	381.596.000	362.470.855,00	94,99	98,79
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	456.477.000	356.481.219,00	78,09	90,09
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	456.477.000	356.481.219,00	78,09	90,09
JUMLAH		2.257.853.000,00	1.956.269.637,00	86,64	92,87

Untuk Dana Tugas Pembantuan dari pagu sebesar Rp. 2.257.853.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) terealisasi anggaran sebesar Rp.1.956.269.637,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau 86,64 % dengan realisasi fisik sebesar 92,87%. Penilaian kinerja dengan nilai 86,64% dengan capaian realisasi kinerja dalam kategori predikat kinerja *Tinggi* , hal ini berarti program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk peningkatan produksi dan produktivitas komoditi utama perkebunan. Adapun rincian permasalahan dan solusi masing-masing kegiatan APBN Tugas Pembantuan sebagai berikut :

A. Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Permasalahan :

1. Dalam pelaksanaan pengawalan dan pendampingan kegiatan yang berlokasi di Kab. Kepulauan Meranti sedikit mengalami kendala dari sisi waktu pelaksanaannya karena sebagian besar lokasi berada cukup jauh dari ibukota kabupaten, sehingga memerlukan waktu ekstra sedangkan waktu yang diberikan hanya 3 (tiga) hari perjalanan
2. Sehubungan dengan kegiatan bantuan kepada kelompok tani, terutama berupa pupuk dan herbisida, dimana harga pupuk dan pestisida naik cukup signifikan sehingga mengalami kesulitan dalam mencari pupuk dan pestisida

yang sesuai dengan besaran anggaran yang telah disediakan

Solusi:

1. Terhadap lokasi yang memang memerlukan waktu ekstra, sebaiknya diberikan waktu penugasan yang sedikit lebih longgar, minimal 4 (empat) hari perjalanan
2. Perlu dilakukan revisi standar satuan harga sebagai dasar pagu anggaran, sehingga dalam pelaksanaan pengadaan pupuk dan herbisida kedepannya lebih sesuai dengan kondisi harga pasar yang berlaku

B. Penguatan Perlindungan Perkebunan

Permasalahan :

1. Secara umum yang menjadi pelaksanaan kegiatan terkait perlindungan perkebunan adalah dalam merealisasikan perawatan sarana prasarana pengendalian kebakaran brigade dan KTPA, dimana sarana prasarana tersebut, sebagian besar telah diserahkan terimakan kepada daerah, sehingga hanya beberapa sarana prasarana saja yang dapat didanai perawatannya.

Solusi:

1. Perlu membuat aturan pelaksanaan bantuan perawatan sarana prasarana yang lebih fleksible, sehingga sarana prasarana yang telah dihibahkan tersebut masih tetap terawat dengan baik

C. Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Permasalahan :

1. Dalam penetapan harga TBS yang ditetapkan bersama, dikarenakan saat ini masih dalam masa pandemi covid 19, sehingga tidak dapat dilakukan secara tatap muka langsung dengan pelaku usaha
2. Terkait dengan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Tanaman

Perkebunan juga mengalami permasalahan karena masih dalam situasi pandemi covid 19.

3. Pelaksanaan Promosi produk hasil perkebunan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan informasi pelaksanaannya yang sedikit terlambat, sehingga persiapan untuk mengikutinya menjadi terkendala dan juga bersamaan dengan pelaksanaan peringatan hari perkebunan yang dilaksanakan oleh Provinsi Riau
4. Permasalahan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat dimana di Provinsi Riau ditetapkan pada 4 (empat) Kabupaten mengalami kendala dikarenakan tim pelaksana fasilitasi ditingkat kabupaten sangat terbatas yaitu pada awalnya terdiri dari 1 (satu) orang tim pendataan, 2 (dua) orang tim verifikasi dokumen, dan 2 (dua) orang tim pemetaan dan pemeriksa lapangan, yang menjadi kendala adalah bahwa setiap anggota tim kehabisan waktu kelapangan dalam pelaksanaannya

Solusi:

1. Pekerjaan penetapan harga TBS dilakukan secara daaring, namun penyampaian permasalahan dilapangan oleh pelaku usaha sedikit terbatas walaupun pada akhirnya kesepakatan harga tetap terlaksana
2. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap harga pasar komoditi perkebunan tetap dilaksanakan dengan kunjungan langsung dan sebagian dengan daaring.
3. Sebaiknya informasi pelaksanaan terkait promosi hasil produk perkebunan yang dilaksanakan oleh pusat, dapat terencana dengan baik sehingga persiapan untuk mengikutinya jauh lebih baik pula
4. Telah dilakukan revisi terhadap jumlah anggota tim, yaitu menjadi 1 (satu) orang tim pendataan, 3 (tiga) orang tim verifikasi dokumen, dan 3 (tiga) orang tim pemetaan

dan pemeriksa lapangan sehingga pelaksanaan dapat lebih cepat.

D. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Permasalahan :

1. Dalam pelaksanaan pengawalan dan pendampingan kegiatan yang berlokasi di Kab. Kepulauan Meranti sedikit mengalami kendala dari sisi waktu pelaksanaannya karena sebagian besar lokasi berada cukup jauh dari ibukota kabupaten, sehingga memerlukan waktu ekstra sedangkan waktu yang diberikan hanya 3 (tiga) hari perjalanan
2. Sehubungan dengan kegiatan bantuan kepada kelompok tani, terutama berupa pupuk dan herbisida, dimana harga pupuk dan pestisida naik cukup signifikan sehingga mengalami kesulitan dalam mencari pupuk dan pestisida yang sesuai dengan besaran anggaran yang telah disediakan

Solusi:

1. Terhadap lokasi yang memang memerlukan waktu ekstra, sebaiknya diberikan waktu penugasan yang sedikit lebih longgar, minimal 4 (empat) hari perjalanan
2. Perlu dilakukan revisi standar satuan harga sebagai dasar pagu anggaran, sehingga dalam pelaksanaan pengadaan pupuk dan herbisida kedepannya lebih sesuai dengan kondisi harga pasar yang berlaku

E. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Permasalahan :

1. Kesulitan dalam membagi Penanggungjawab Provinsi dan Kabupaten yang volume nya tidak sesuai dengan jumlah kegiatan yang ada pada POK tahun berjalan.
2. Terkait dengan Operasional Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perkebunan (THL-PP) dimana dalam realisasinya tidak

dapat terlaksana 100%, hal ini dikarenakan lambatnya Surat Keputusan penetapan salah satu THL PP dari pusat

Solusi:

1. Untuk honorarium Penanggungjawab Provinsi dan Kabupaten perlu disesuaikan dengan jumlah kegiatan yang ada pada tahun berjalan
2. Perlu koordinasi yang baik baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten lokasi THL PP bertugas, mulai dari penetapan THL PP sampai pada evaluasi kinerja THL PP yang ada.

Secara umum Progam Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Riau dapat terlaksana secara optimal walaupun dengan anggaran terbatas.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 KESIMPUNAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 atas tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai langkah perbaikan yang berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2021 dengan realisasi Fisik adalah sebesar 93,31%, dan realisasi keuangan sebesar 84,32%. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat dikategorikan berhasil atau tercapai.

Capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dari 7 indikator jumlah produksi dan produktivitas komoditas utama perkebunan dan 1 indikator persentase peningkatan kompetensi SDM yang diukur, terdapat 4 indikator jumlah produksi dan produktivitas komoditas utama perkebunan yang dikategorikan sangat tinggi atau lebih besar dari 91,00 %, 2 indikator yang dikategorikan tinggi dengan 90 % dan lebih besar dari 76 % dan 2 indikator dikategorikan sangat rendah dengan kurang dari 50%, dimana pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Produktivitas tanaman perkebunan masih rendah, dimana produktivitas perkebunan masih dibawah produktivitas nasional. Hal ini juga mempengaruhi upaya pencapaian peningkatan produksi. Produktivitas tersebut masih dapat ditingkatkan dengan pemberian input teknologi atau pemanfaatan teknologi yang ada. Untuk itu dukungan kegiatan seperti penyediaan benih bermutu, penggunaan pupuk yang sesuai, sarana dan prasarana yang memadai serta membangun keterampilan dan kemampuan petani dan petugas menjadi hal yang sangat penting.

NTUP Perkebunan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pada Tahun 2021 sebesar 149,56 ini menunjukkan bahwa usaha petani sub sektor perkebunan surplus yang berarti petani yang melakukan usaha perkebunan dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat menambah kesejahteraan keluarganya. Kenaikan NTUP sub sektor perkebunan ditopang oleh berbagai fasilitas pendukung antara lain adanya kenaikan harga jual hasil komoditi perkebunan.

4.2 LANGKAH STRATEGIS YANG AKAN DILAKUKAN OLEH OPD UNTUK MENINGKATKAN KINERJA MASA MENDATANG

Agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan yang tercantum dalam Renstra maka langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun;

Strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan kedepan perlu ditekankan, diintensifkan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran. Pemberdayaan pekebun dengan fokus pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah perlu dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan agar terwujud komoditas unggulan daerah yang berkualitas, tangguh dan mampu bersaing dalam era pasar bebas baik pasar global maupun pasar ASEAN. Selain itu aspek penyuluhan akan memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan inovasi petani/pekebun.

2. Memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industri berkelanjutan;

Pemenuhan penyediaan bahan baku bioenergi dan pengembangan pondasi sistem pertanian bio-industri dengan fokus pengembangan komoditas kelapa sawit baik melalui kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas maupun melalui kegiatan

integrasi tanaman perkebunan dengan ternak dan tumpang sari dengan komoditas pertanian lainnya.

3. Peningkatan kompetensi SDM aparatur / petani

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petugas/petani dan kelembagaan guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan

4. Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD (bersih, transparan, dan akuntabel)

Strategi peningkatan pelayanan internal OPD yang bersih, transparan dan akuntabel diarahkan pada peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel, profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Riau ini, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta alat komunikasi dalam memberikan informasi akuntabilitas pelaksanaan kegiatan kedepannya. Berbagai hal kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 agar dijadikan bahan evaluasi guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja selanjutnya.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana secara berkesinambungan oleh para pimpinan sehingga akan diperoleh pencapaian target program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang

Pekanbaru, Januari 2022
KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

Ir. ZULFADLI
Pembina Utama Madya
NIP. 19660803 199211 1 001

LAMPIRAN

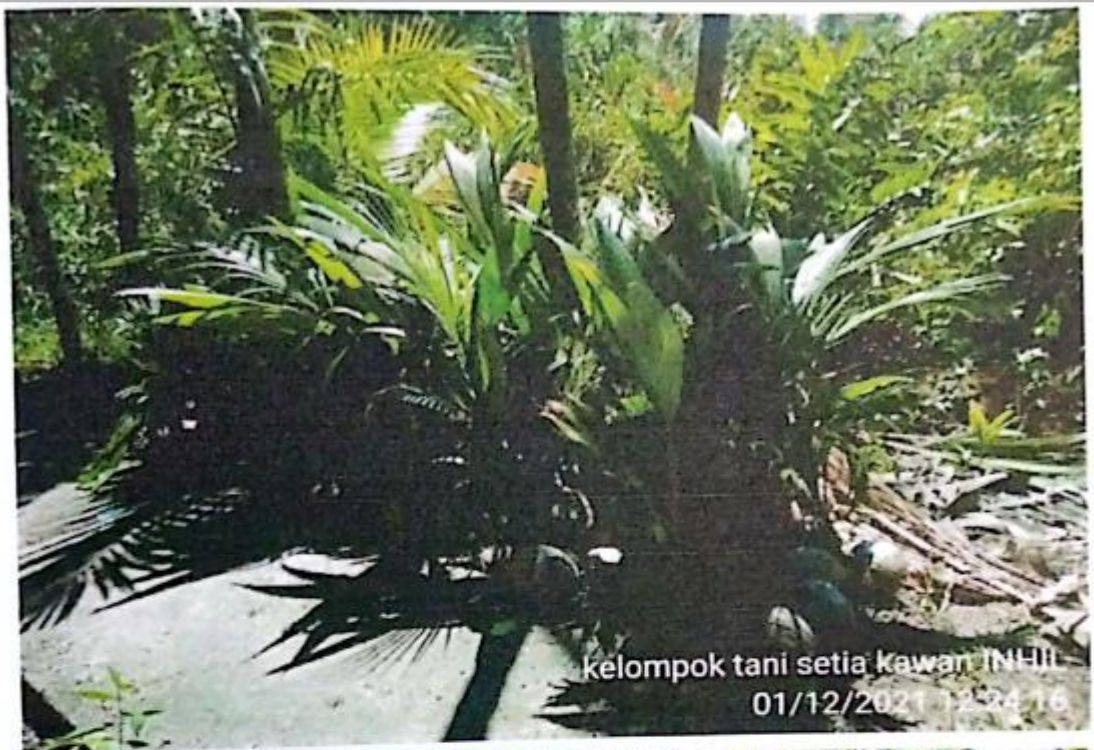
DOKUMENTASI
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2021



CP CL Sub Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa, Kab Inhil
-0°20'46", 103°2'8", 13,0m, 182°
16:56:21

CPCL

Peremajaan kebun Kelapa rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir



Distribusi Bantuan Bibit Kelapa kepada Kelompok tani

Dokumentasi
Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluh Pertanian



Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Dokumentasi
Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman
Perkebunan



Pengendalian P



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ZULFADLI**
Jabatan : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAMSUAR**
Jabatan : Gubernur Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


SYAMSUAR

Pekanbaru, Januari 2021

Pihak Pertama


ZULFADLI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660803 199211 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

No.	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	TUJUAN STRATEGIS		
1.	Meningkatnya Pendapatan Petani Perkebunan	NTUP Perkebunan	100.10
B.	SASARAN STRATEGIS		
1.	Meningkatnya kinerja ASN dan pelayanan publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	69 (B)
2.	Terwujudnya Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan	
		* Kelapa Sawit (ton)	8,071,651.60
		* Kelapa (ton)	391,457.00
		* Karet (ton)	384,855.00
		Produktivitas Tanaman Perkebunan	
		* Kelapa Sawit (ton)	4.08
		* Kelapa (ton)	2,662.00
		* Karet (ton)	1,239.00
		* Sagu (ton)	7,690.00
3.	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian / Perkebunan	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	3 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Riau	5,044,894,328	
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	787,294,130	
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5,553,600,076	
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	93,220,931	
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	165,585,870	
6.	Program Penyuluh Pertanian	143,316,816	
	TOTAL APBD	11,787,912,151	
	Dekonsentrasi	704,591,000	
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	195,600,000	
2.	Program Dukungan Manajemen	508,991,000	
	Tugas Pembantuan	3,438,089,000	
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2,895,162,000	
2.	Program Dukungan Manajemen	542,927,000	
	TOTAL APBN	4,142,680,000	

PIHAK KEDUA


SYAMSUAR

Pekanbaru, Januari 2021

PIHAK PERTAMA



Ir. ZULFADLI

Perbina Utama Muda

NIP. 19660803 199211 1 001